



# **PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024**



## **BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 dapat terselesaikan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ini sebagai implementasi dari program dan kegiatan yang telah diusulkan dan sedang berjalan sehingga mempunyai kredibilitas nilai yang bersifat terstrukturisasi melalui kerangka acuan aparatur umum tentang pembangunan daerah kedepan.

Selain itu adanya review dari hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan, dokumen ini diharapkan dapat menjelaskan skala prioritas secara konkrit dari setiap program dan kegiatan yang telah direncanakan sehingga dapat memacu gerak dan langkah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Lawas Utara untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.

Demikian dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 disusun, atas dukungan semua pihak, teriring ucapan terima kasih dan semoga bermanfaat.

Gunungtua, 15 Agustus 2024



**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

**RESKI BASYAH, S.STP, M.Si  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19830923 200212 1 003**

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
	1.1. Latar Belakang .....	1
	1.2. Landasan Hukum .....	2
	1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
	1.4. Sistematika Penulisan.....	4
<b>BAB II</b>	<b>HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....</b>	<b>6</b>
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 .....	6
<b>BAB III</b>	<b>TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....</b>	<b>17</b>
	3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah .....	17
	3.2. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah .....	18
	3.3. Program dan Kegiatan .....	21
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>26</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sampai Triwulan II .....	8
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 .....	18
Tabel 3.2	Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	21
Tabel 3.3	Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja (Rencana Kerja) Tahun 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia .....	23

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang**

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Padang Lawas Utara adalah penjabaran Rencana Kerja lima tahunan berupa Rencana Strategis (Renstra). Sehingga Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 perangkat daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 merupakan acuan perangkat daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024;
3. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 perangkat daerah merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 perangkat daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berjalan;

2. Program dalam Rencana Kerja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam RPD pada tahun berjalan;
3. Program dan kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
4. Program dan kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Sejalan dengan Tema Pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara dan dapat mendukung terlaksananya sasaran dan kebijakan strategis pembangunan bidang pemerintahan di Tahun 2024 yang menjadi tugas dan tanggungjawab Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Padang Lawas Utara yakni melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian.

Untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran dalam melaksanakan kebijakan strategis tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Padang Lawas Utara menyusun Rencana Kerja Tahun 2024. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 merupakan penjabaran Renstra 2024-2026. Rencana Kerja perangkat daerah yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran perangkat daerah.

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2005-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2013 Nomor 440), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 16);
10. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023 Nomor 15);

11. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Lawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023 Nomor 51);
12. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 tanggal 19 Juli 2024;
13. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 Tanggal 15 Agustus 2024.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 adalah sebagai panduan dalam penyusunan Rencana Kerja yang merupakan acuan dalam melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan dalam sisa waktu 1 (satu) tahun anggaran sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah:

1. Terwujudnya penjabaran Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2024;
2. Terwujudnya penjabaran Renstra tahun 2024-2026 Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Lawas Utara;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan perubahan anggaran Tahun 2024;
4. Melakukan evaluasi terhadap Rencana Kerja tahun lalu dan pada tahun berjalan.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Racangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah:

**BAB I      PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II      EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) BKPSDM  
TAHUN LALU**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah  
sampai dengan Triwulan II

**BAB III     RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja ( Renja) Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.3 Program dan Kegiatan

**BAB IV     PENUTUP**

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II**

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Lawas Utara adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Lawas Utara ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Lawas Utara selama Tahun 2024 dan perkiraan target tahun 2025.

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Lebih lanjut rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Tahun 2023 dan pencapaian Renstra SKPD sampai dengan Tahun berjalan (2024) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Lawas Utara sebagaimana dalam tabel lampiran pada laporan ini.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2024 – 2026, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Padang Lawas Utara pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Berupaya dalam peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah melalui penguatan komitmen terhadap penerapan alokasi anggaran berbasis kinerja, evaluasi target kinerja dan realisasi anggaran secara berkala serta implementasi perjanjian kinerja dari level tertinggi s/d level terbawah;
- b. Upaya dalam manajemen ASN berbasis skala prioritas Rencana Pembangunan Daerah melalui optimalisasi penataan tenaga non ASN menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui seleksi terbuka pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
- c. Melakukan upaya peningkatan kualifikasi Pendidikan melalui Ujian Penyesuaian Ijazah dan pengembangan karir ASN melalui pelaksanaan Ujian Dinas bagi ASN yang memenuhi syarat dalam ketentuan manajemen ASN;
- d. Meningkatkan kualitas informasi dan data kepegawaian yang akurat dan mutakhir melalui integrasi sistem manajemen kepegawaian daerah dengan sistem manajemen kepegawaian nasional secara berkelanjutan.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini:

**Tabel 2.1**  
**Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**  
**sampai Triwulan II Tahun 2024**

KODE	Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan daerah Dan Perogram/ Kegiatan	Indikator kinerja Program (out come)/ kegiatan (output)	Target Capaian kinerja RPD Tahun 2024 - 2026	Realisasi target kinerja hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaraan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program/ Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2024	Perkiraan Realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5.03	KEPEGAWAIAN									
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	B Predikat					B Predikat	Predikat	0,00%
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Kegiatan					1 Kegiatan	2 Kegiatan	50,00%
5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	10 Laporan					10 Laporan	1 Laporan	33,33%

KODE	Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program (out come)/ kegiatan (output)	Target Capaian kinerja RPD Tahun 2024 - 2026	Realisasi target kinerja hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program/ Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2024	Perkiraan Realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah	97 %					93 %	93 %	95,88%
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/ Bulan					29 Orang/ Bulan	29 %	100,00%
5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dok.					12 Dok.	12 Orang/ Bulan	100,00%
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Kegiatan					1 Kegiatan	1 Dok.	33,33%
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket					Paket	Kegiatan	

KODE	Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program (out come)/ kegiatan (output)	Target Capaian kinerja RPD Tahun 2024 - 2026	Realisasi target kinerja hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program/ Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2024	Perkiraan Realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 <i>Paket</i>					<i>Paket</i>	<i>Paket</i>	
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	800 <i>Paket</i>						<i>Paket</i>	
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9 <i>Paket</i>					<i>Paket</i>	<i>Paket</i>	
5.03.01.7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	19 <i>Dok.</i>					<i>Dok.</i>	<i>Dok.</i>	
5.03.01.7.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	215 <i>Laporan</i>					<i>Laporan</i>	<i>Laporan</i>	

KODE	Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program (out come)/ kegiatan (output)	Target Capaian kinerja RPD Tahun 2024 - 2026	Realisasi target kinerja hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program/ Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2024	Perkiraan Realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.03.01.7.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Kegiatan					1 Kegiatan	1 Kegiatan	33,33%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit					0 Unit	0 Unit	0,00%
5.03.01.5	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Paket					1 Paket	1 Paket	100,00%
5.03.01.6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit					Unit	0 Unit	0,00%

KODE	Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program (out come)/ kegiatan (output)	Target Capaian kinerja RPD Tahun 2024 - 2026	Realisasi target kinerja hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program/ Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2024	Perkiraan Realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.03.01.6.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Kegiatan					Kegiatan	0 Kegiatan	0,00%
5.03.01.6.7	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 Laporan					12 Laporan	12 Laporan	200,00%
5.03.01.6.8	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan					2 Laporan	2 Laporan	33,33%
5.03.01.1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan					2 Laporan	2 Laporan	33,33%
5.03.01.3	Perencanaan. Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan. Penganggaran. Dan Evaluasi Kinerja	16 Laporan					36 Laporan	36 Laporan	100,00%
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>3 Kegiatan</b>					<b>Kegiatan</b>	<b>Kegiatan</b>	

KODE	Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program (out come)/ kegiatan (output)	Target Capaian kinerja RPD Tahun 2024 - 2026	Realisasi target kinerja hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program/ Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2024	Perkiraan Realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>penunjang urusan pemerintahan daerah</b>								
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit					Unit	Unit	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	88 Unit					Unit	Unit	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit					Unit	Unit	
5.03.02	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>Persentase pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi</b>	90 %					100 %	100 %	100,00%

KODE	Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program (out come)/ kegiatan (output)	Target Capaian kinerja RPD Tahun 2024 - 2026	Realisasi target kinerja hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program/ Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2024	Perkiraan Realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		pembangunan daerah								
5.03.02.2	Mutasi Dan Promosi ASN	Jumlah Kegiatan Mutasi Dan Promosi ASN Yang Terlaksana	3 Kegiatan					4 Kegiatan	4 Kegiatan	100,00%
5.03.02.2.7	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi. Jabatan Administrasi. Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	120 Dok.					1 Dok.	1 Dok.	33,33%
5.03.02.2.8	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	300 Laporan					1 Laporan	1 Laporan	33,33%
5.03.02.2.9	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	200 Dok.					Dok.	0 Dok.	0,00%
5.03.02.1	Pengadaan. Pemberhentian Dan Informasi Kepegawaian ASN	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan. Pemberhentian Dan	6 Kegiatan					1 Kegiatan	1 Kegiatan	33,33%

KODE	Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program (out come)/ kegiatan (output)	Target Capaian kinerja RPD Tahun 2024 - 2026	Realisasi target kinerja hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program/ Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2024	Perkiraan Realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		<b>Informasi Kepegawaian ASN</b>								
5.03.02.1.13	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	7 <i>Laporan</i>					3 <i>Laporan</i>	3 <i>Laporan</i>	33,33%
5.03.02.1.14	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	24 <i>Dok.</i>					<i>Dok.</i>	0 <i>Dok.</i>	0,00%
<b>5.03.02.3</b>	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>Jumlah Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN Yang Terlaksana</b>	<b>6 <i>Kegiatan</i></b>					<b><i>Kegiatan</i></b>	<b>0 <i>Kegiatan</i></b>	<b>0,00%</b>
5.03.02.3.11	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	200 <i>Orang</i>					<i>Orang</i>	0 <i>Orang</i>	0,00%
5.03.02.3.12	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	5 <i>Dok.</i>					<i>Dok.</i>	0 <i>Dok.</i>	0,00%

KODE	Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program (out come)/ kegiatan (output)	Target Capaian kinerja RPD Tahun 2024 - 2026	Realisasi target kinerja hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program/ Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2024	Perkiraan Realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.03.02.3.13	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	5 Orang					Orang	0 Orang	0,00%
5.03.02.4	Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Kegiatan					Kegiatan	0 Kegiatan	0,00%
5.03.02.4.3	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	4 Laporan					1 Laporan	1 Laporan	100,00%

### **BAB III**

## **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

### **3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah**

Tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026 adalah "Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih dibidang manajemen kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia aparatur".

Penetapan tujuan didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan Rencana Pembangunan Daerah. Penetapan tujuan akan mengarahkan pada kemudahan dalam perumusan program dan kegiatan. Sedangkan sasaran menggambarkan target yang ingin dicapai melalui program dan kegiatan tersebut.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia serta membantu Bupati Padang Lawas Utara dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, kebijakan yang *up to date*, mampu menjawab tantangan dan isu-isu strategis yang berkembang dalam manajemen ASN.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Pelayanan**  
**Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024**

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA 2024
	Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih dibidang manajemen kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia aparatur	Nilai Implementasi Sistem Merit	220 (II) / "Kurang"
1	Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai AKIP	66,52 (B)
		Nilai Indeks Survei Kepuasan Masyarakat	78 (Baik)
2	Peningkatan kualitas manajemen kepegawian dan Pengembangan sumber daya manusia aparatur	Nilai Indeks NSPK Manajemen ASN	65 (C) / "Cukup"
		Nilai Indeks Profesionalitas ASN	71 "Sedang"

### 3.2. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia antara lain:

- **Manajemen Aparatur Sipil Negara**, bahwa pelaksanaan manajemen ASN mengalami perubahan yang cukup fundamental dengan diterbitkannya Undang-undang nomor 5 tahun 2014 uu no 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Aparatur Sipil Negara terbagi menjadi 2 jenis yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Selanjutnya, turunan undang-undang tersebut diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

- ***Sistem Rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)***, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pasal 99 mensyaratkan seluruh aparatur pemerintah yang berstatus non ASN akan dihapuskan atau dialihkan menjadi PPPK paling lambat per 28 November 2023 yang dipertegas dengan Surat MenPANRB kepada seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) tertanggal 25 Juli 2022 lalu. Tentu kebijakan ini menimbulkan banyak nya polemik dan kontra khususnya dari pemerintah daerah yang sebagian besar sumber daya aparatur nya masih berstatus honorer, termasuk Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, ada sekitar 3.800-an ASN dan sekitar 4.000-an tenaga honorer yang terdata, kalau kebijakan ini diterapkan tentunya akan banyak ketimpangan dan kesenjangan terhadap kinerja perangkat daerah yang langsung juga akan berdampak pada perputaraan ekonomi dan menimbulkan pengangguran massal. Melihat dampak negative yang begitu besar, akhirnya Pemerintah Pusat menunda penerapan kebijakan tersebut sampai batas yang tidak ditentukan. Sebagai solusinya, Pemerintah Pusat memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan rekrutmen PPPK sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- ***Sistem Merit dan NSPK Manajemen ASN serta Profesionalitas ASN***, UU No. 5 Tahun 2014 dan peraturan turunannya PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020 mensyaratkan agar manajemen ASN dilaksanakan berbasis sistem merit dimana pengawasan dan pengendaliannya menjadi kewenangan KASN, sistem merit ini terbagi atas 8 (delapan) aspek dalam manajemen ASN. Selanjutnya Badan Kepegawaian Negara juga memiliki kewenangan dalam pengawasan dan pengendalian NSPK Manajemen ASN sebagaimana diatur dalam PerBKN No. 12 Tahun 2022 serta adanya usaha peningkatan profesionalitas ASN melalui peningkatan Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) yang juga menjadi kewenangan BKN sebagaimana diatur dalam PermenPANRB No. 38 Tahun 2018 dan PerBKN No. 8 Tahun 2019. Ketiga isu manajemen ASN di atas tentu menjadi prioritas juga dalam manajemen dan pengembangan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai bagian dari tugas pokok dan fungsi BKPSDM, juga yang menjadikan isu ini penting adalah

dilakukan evaluasi setiap tahunnya oleh instansi yang berwenang atas pelaksanaannya.

- **Pengembangan Kompetensi dan Kualifikasi Pendidikan**, Lagi-lagi UU No. 5 Tahun 2014 dan aturan turunannya mensyaratkan pengembangan kompetensi minimal 20 JP per tahun bagi setiap ASN. Lembaga Administrasi Negara (LAN) selaku instansi yang berwenang dalam pengembangan Pendidikan dan Pelatihan ASN menetapkan pedoman penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi ASN sebagai berikut :

- Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
- Keputusan Kepala LAN Nomor: 289/K.1/PDP.07/2022 tentang Pedoman Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Pengembangan kompetensi juga mengalami beberapa perubahan misalnya pengembangan kompetensi melalui jalur Pendidikan, dengan terbitnya Surat Edaran MenPANRB Nomor 28 Tahun 2021 tertanggal 29 Desember 2021 memungkinkan pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan ditempuh dengan metode online dan diperbolehkan mengambil perkuliahan sabtu-minggu asalkan prodi yang diambil sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku. Sama halnya dengan penyelenggaraan Diklat juga sudah memungkinkan dilaksanakan dengan metode online. Tentunya perubahan-perubahan ini harus direspon dengan cepat dan tanggap.

- **Manajemen Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi**, seiring dengan kemajuan teknologi, pemerintah juga dituntut untuk mampu memanfaatkan teknologi tersebut sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi. Oleh karena itu, manajemen kepegawaian berbasis elektronik tidak bisa dihindari. Badan Kepegawaian Negara selaku pemangku kewenangan dalam pelaksanaan manajemen ASN juga telah banyak mengupayakan pemanfaatan teknologi dalam manajemen ASN, sebagai amanah dari UU No. 5 Tahun 2014

yang mensyaratkan manajemen ASN harus dilakukan secara online melalui SI-ASN. SI-ASN ini telah mencakup seluruh aspek dalam manajemen ASN, mulai dari layanan kenaikan pangkat secara online, layanan pengajuan pensiun secara online, penetapan hukuman disiplin secara online, manajemen kinerja secara online dan lain sebagainya. Untuk itu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Padang Lawas Utara juga harus responsive terhadap isu ini.

□

**Tabel 3.2**  
**Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi**

NO	KEBIJAKAN NASIONAL/PROVINSI	SUMBER	KETERANGAN
1	2	3	4
A	NASIONAL		
1.	Manajemen ASN berbasis sistem merit dan NSPK serta peningkatan IP ASN	APBD	
2.	Rekrutmen PPPK	APBD	
3.	Pengembangan Kompetensi	APBD	
4.	Manajemen Kepegawaian berbasis teknologi informasi	APBD	

□

### 3.3. Program dan Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026 menetapkan program prioritas Kabupaten Padang Lawas Utara adalah Digitalisasi Pelayanan Publik dan Penguatan Reformasi Birokrasi yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih dengan sasaran meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang prima yang mana salah satu arah kebijakannya adalah meningkatkan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Selanjutnya, sebagai pengungkit tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program prioritas daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Padang Lawas Utara berupaya menjabarkannya kedalam Renstra Tahun 2024-2026. Kemudian direalisasikan ke dalam RKPD Perangkat Daerah. Adapun program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 dirumuskan sebagai berikut:

1. Peningkatan akuntabilitas kinerja;
2. Peningkatan kualitas manajemen kepegawaian dan Pengembangan sumber daya manusia aparatur.

Selanjutnya, sasaran strategik yang disusun oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) sebagai berikut:

1. Penguatan komitmen terhadap implementasi atas perencanaan dan penganggaran perangkat daerah;
2. Mengoptimalkan manajemen ASN berbasis sistem merit dan implementasi NSPK Manajemen ASN;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam manajemen ASN;
4. Mengoptimalkan pengembangan ASN berbasis analisis kebutuhan pengembangan kompetensi.

Dengan memperhatikan arah pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) merumuskan Perubahan Rencana Kerja dan kegiatan Tahun 2024. Adapun rumusan Perubahan rencana program dan kegiatan, indikator, penyebaran lokasi pelaksanaan kegiatan, target, indikatif anggaran dijelaskan dalam tabel 3.3 dibawah

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KAB. PADANG LAWAS UTARA  
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>																		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							4.869.457.316,00	5.082.478.059,00	4.757.200.854,00	-112.256.462,00							5.490.952.784,00	
	5.03	KEPEGAWAIAN							4.869.457.316,00	5.082.478.059,00	4.757.200.854,00	-112.256.462,00							5.490.952.784,00	
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	3.858.209.516,00	4.071.230.259,00	3.640.271.054,00	513.993.988,00							4.372.203.504,00	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	31.302.600,00	31.302.600,00	38.567.100,00	7.264.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Padang Lawas Utara		31.302.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10 Laporan	10 Laporan	31.302.600,00	31.302.600,00	38.567.100,00	7.264.500,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			31.302.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.711.377.116,00	2.970.330.259,00	2.545.053.454,00	-166.323.662,00							2.839.657.904,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	2.550.337.116,00	2.809.290.259,00	2.516.733.454,00	-33.603.662,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			2.678.617.904,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				120 Dokumen	12 Dokumen	161.040.000,00	161.040.000,00	28.320.000,00	-132.720.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			161.040.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	377.724.100,00	377.724.100,00	399.277.200,00	21.553.100,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Padang Lawas Utara		1.041.485.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.724.600,00	3.724.600,00	3.724.600,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			3.724.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				44 Paket	44 Paket	98.656.400,00	98.656.400,00	92.643.900,00	-6.012.500,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			760.656.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				800 Paket	800 Paket	18.920.000,00	18.920.000,00	18.920.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			18.920.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	45.413.100,00	45.413.100,00	45.413.100,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			45.195.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				14 Dokumen	14 Dokumen	21.058.000,00	21.058.000,00	21.058.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			20.887.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				115 Laporan	114 Laporan	189.952.000,00	189.952.000,00	217.517.600,00	27.565.600,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			192.102.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	560.465.700,00	514.533.300,00	450.033.300,00	-110.432.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Padang Lawas Utara		282.418.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1000 Laporan	1000 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	290.418.000,00	290.418.000,00	225.918.000,00	-64.500.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			272.418.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				16 Laporan	16 Laporan	260.047.700,00	214.115.300,00	214.115.300,00	-45.932.400,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	177.340.000,00	177.340.000,00	207.340.000,00	30.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Padang Lawas Utara		177.340.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan				9 Unit	9 Unit	76.790.000,00	76.790.000,00	76.790.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				76.790.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				37 Unit	37 Unit	100.550.000,00	100.550.000,00	130.550.000,00	30.000.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				100.550.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Jumlah ASN yang memahami Penilaian Kinerja berbasis E-Kinerja Terpuhinya Penataan ASN dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian				50 90 persen Persen	50 90 persen Persen	1.011.247.800,00	1.011.247.800,00	1.116.929.800,00	107.501.480,00								1.118.749.280,00	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN				7 laporan	7 laporan	141.450.000,00	141.450.000,00	405.957.400,00	264.507.400,00			-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Padang Lawas Utara		373.531.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN																			
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN				7 Laporan	7 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	289.507.400,00	264.507.400,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				257.081.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				24 Dokumen	24 Dokumen	116.450.000,00	116.450.000,00	116.450.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				116.450.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				200 Dokumen	200 Dokumen	187.000.000,00	187.000.000,00	259.761.800,00	72.761.800,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Padang Lawas Utara		126.773.280,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	53.280.000,00	53.280.000,00	53.280.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				53.280,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Naikan Pangkat ASN																			
			Jumlah Pengelolaan Naikan Pangkat ASN				10 Dokumen	10 Dokumen	47.244.000,00	47.244.000,00	41.544.000,00	-5.700.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				40.764.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				10 Dokumen	10 Dokumen	86.476.000,00	86.476.000,00	164.937.800,00	78.461.800,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				85.956.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengembangan Karir				4 Dokumen	4 Dokumen	657.798.000,00	657.798.000,00	426.210.800,00	-231.587.200,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Padang Lawas Utara		593.444.200,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN																			
			Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya				200 Orang	200 Orang	141.849.700,00	141.849.700,00	170.730.800,00	28.881.100,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				141.815.700,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																			
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				5 Orang	2 Orang	389.280.000,00	389.280.000,00	148.320.000,00	-240.960.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				324.960.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0008	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional</i>				275 Orang	5 Orang	126.668.300,00	126.668.300,00	107.160.000,00	-19.508.300,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			126.668.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-						24.999.800,00	24.999.800,00	24.999.800,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Padang Lawas Utara		25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN																			
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN</i>				4 Laporan	4 Laporan	24.999.800,00	24.999.800,00	24.999.800,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
<b>J U M L A H</b>									<b>4.869.457.316,00</b>	<b>5.082.478.059,00</b>	<b>4.757.200.854,00</b>	<b>50.739.751.137,00</b>								<b>5.490.952.784,00</b>	

## BAB IV PENUTUP

Demikian Perubahan Rencana Kerja (P. Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 disusun, dengan harapan agar seluruh elemen pelaksana di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Lawas Utara dapat menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas serta partisipasi dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program – program yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja ini.

Gunungtua, 15 Agustus 2024

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**



**RESKI BASYAH, S.STP, M.Si  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19830923 200212 1 003**